

Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) di Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

Wandy Desry

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Elisabet Pali

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Stefani M. Palimbong

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Korespondensi penulis: wandydesry@gmail.com

Abstract: *Lembang Financial Performance Analysis is a form of accountability and a manifestation of financial decentralization and authority from the center to lembang. A lembang that is able to manage its finances effectively and efficiently is certainly expected to be able to stimulate the economy through absorption of the budget in productive and potential sectors so that overall it will be able to increase efficiency. In this study, efficiency ratio analysis is used to see how far the Lembang Burasia Government is in managing its regional finances. The results of the calculation of regional financial efficiency ratios average 120%.*

Keywords: *Lembang Revenue and Expenditure Budget efficiency.*

Abstrak: Analisis Kinerja Keuangan Lembang adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dan wujud dari desentralisasi keuangan maupun kewenangan dari pusat ke lembang. Lembang yang mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien tentu diharapkan mampu merangsang perekonomian melalui penyerapan anggaran di sektor-sektor produktif dan potensial yang dimiliki sehingga secara menyeluruh akan mampu meningkatkan efisiensi. Dalam penelitian ini digunakan analisis rasio efisiensi untuk melihat sejauh mana Pemerintah Lembang Burasia dalam mengelolah keuangan daerahnya. Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah rata-rata 120%.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang, efisiensi.

LATAR BELAKANG

Era globalisasi saat ini adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban secara terus-menerus dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik yaitu merupakan penyelenggara manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, Pencegahan korupsi baik secara politikal maupun administratif. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi yaitu dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Partisipasi yaitu mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Riau, 2017).

Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat (Batubara, 2020). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah desa yaitu terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. UU Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan Masyarakat setempat.

Dengan adanya asal-usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Makna desa sangat identik dengan masyarakat miskin dan tradisional, akan tetapi desa juga mempunyai kearifan lokal (*local wisdom*) yang sangat luar biasa. Dimana desa merupakan salah satu penemu sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat, desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial masing-masing (Arifiani, 2018). Penilaian kinerja yaitu bagian dari proses pengendalian yang dapat digunakan sebagai alat penilaian. Pengendalian melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) (Arifiani, 2018). Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Widyanti, 2018). Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien yaitu penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, kemudian ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Anggaran digunakan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan kebutuhan tersebut terus menerus berkembang (Siregar, 2015). Adanya otonomi desa, maka pemerintah desa memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Nanda, 2016). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaiian uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. (Pundissing & Pagi, 2021)

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) yaitu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diberikan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan merasa puas), hasil kegiatan yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Darmasto & Restu Agusti, n.d.). Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, hingga mendapatkan gambaran yang sesuai atau yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu data yang didapatkan atau yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio. Analisis Rasio merupakan suatu metode perhitungan serta implementasi rasio keuangan guna menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja yang akan dianalisis menggunakan rasio-rasio dibawah ini :

Rasio kemandirian keuangan

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli desa}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian atau Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Rahayu, 2019)

Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan asli Daerah/Desa}}{\text{Anggaran pendapatan Asli Daerah/Desa}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	>90% -100%
Cukup efektif	>80% -90%
Kurang efektif	>60% -80%
Tidak efektif	60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Rahayu, 2019)

Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efisiensi Keuangan Desa

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Tidak efisien	100% keatas
Kurang efisien	90% -100%
Cukup efisien	80% -90%
Efisien	60% -80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Sriningsih, 2021)

HASIL

Analisis kinerja keuangan pemerintah lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian tingkat kemajuan pelaksanaan realisasi APBL tahun anggaran 2020-2022 dengan menggunakan tiga analisa yaitu rasio efisiensi, efektivitas dan kemandirian.

Dengan menggunakan data APBL dan laporan realisasi APBL Pemerintah lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2020-2022, maka dilakukan analisis dengan cara:

Analisis Rasio Efisiensi Keuanga Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian 2020} &= \frac{100.000.000,00}{1.710.068.748,00} \times 100\% \\ &= 0,058 \times 100 \\ &= 5,8 (6\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian 2021} &= \frac{90.500.000,00}{1.680.252.095,00} \times 100\% \\ &= 0,053 \times 100 \\ &= 5,3 (5\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio kemandirian 2022} &= \frac{115.000.000,00}{1.520.835.277,00} \times 100\% \\ &= 0,075 \times 100 \\ &= 7,9 (8\%)\end{aligned}$$

Analisis Rasio Efektivitas Keuanga Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas 2020} &= \frac{90.550.000,00}{100.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0.955 \times 100 \\ &= 95,5 (95\%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas 2021} &= \frac{87.500.000,00}{90.500.000,00} \times 100\% \\ &= 0,966 \times 100 \\ &= 96,6 (97\%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio efektivitas 2022} &= \frac{90.000.000,00}{115.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,782 \times 100 \\ &= 78,2 (78\%)\end{aligned}$$

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi 2020} &= \frac{1.726.205.071,00}{1.710.068.748,00} \times 100\% \\ &= 1,009 \times 100 \\ &= 100,9 (101\%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi 2021} &= \frac{1.724.265.166,00}{1.680.252.095,00} \times 100\% \\ &= 1,026 \times 100 \\ &= 102,6 (103\%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi 2022} &= \frac{1.643.741.683,00}{1.520.835.277,00} \times 100\% \\ &= 1,080 \times 100 \\ &= 108 (108\%)\end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Lembang Burasia Tahun Anggaran 2020 – 2022 Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Periode 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Lembang (Rp)	Biaya Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian %	Kriteria
2020	100.000.000,00	1.710.068.748,00	6%	Rendah sekali
2021	90.500.000,00	1.680.252.095,00	5%	Rendah sekali
2022	115.000.000,00	1.520.835.277,00	8%	Rendah sekali

Sumber: Pemerintah Lembang Burasia (data diolah 2023)

Kinerja keuangan pemerintah lembang burasia tahun anggaran 2020-2022 berdasarkan rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah dengan rata-rata nilai rasio sebesar 6% rasio kemandirian keuangan Lembang Burasia pada tahun 2020 6%, tahun 2021 5%, dan tahun 2022 8% Tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Lembang Burasia masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Lembang Burasia Tahun Anggaran 2020 – 2022 Berdasarkan Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Keuangan Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Periode 2020-2022

Tahun	Realisasi pendapatan Asli Lembang (Rp)	Anggaran pendapatan asli Desa (Rp)	Rasio Efektifitas %	Kriteria
2020	90.550.000,00	100.000.000,00	95%	Efektif
2021	87.500.000,00	90.500.000,00	97%	Efektif
2022	90.000.000,00	115.000.000,00	78%	Kurang efektif

Sumber : Pemerintah Lembang Burasia (data diolah 2023)

Kinerja keuangan Pemerintah Lembang Burasia tahun anggaran 2020 berdasarkan rasio efektivitas berada pada kategori efektif dengan rasio sebesar 95%. Artinya, Pemerintah Lembang Burasia telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi yang dianggarkan. Tahun 2021 nilai rasio efektivitas meningkat menjadi menjadi 97% sehingga masuk dalam kategori efektif, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu berda pada 78% sehingga masuk pada kategori kurang efektif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Lembang Burasia Tahun Anggaran 2020 – 2022 Berdasarkan Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Periode 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah/Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah/Desa (Rp)	Rasio Efisiensi %	Kriteria
2020	1.726.205.071,00	1.710.068.748,00	101%	Tidak Efisien
2021	1.724.265.166,00	1.680.252.095,00	103%	Tidak Efisien
2022	1.643.741.683,00	1.520.835.277,00	108%	Tidak Efisien

Sumber : Pemerintah Lembang Burasia (data diolah 2023)

Kinerja keuangan Pemerintah Lembang Burasia tahun anggaran 2020 – 2022 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien dengan nilai rasio untuk tahun 2020 sebesar 101% tahun 2021 sebesar 103% dan tahun 2022 sebesar 108% sehingga masuk dalam kategori tidak efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pemerinta Lebang Burasia tahun anggaran 2020 – 2022 berdasarkan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dengan nilai rata – rata sebesar 6,3% Pemerintah Lembang Burasia masih belum maksimal dalam mengelola sumber pendapatan asli desanya sehingga PADes yang diterima terbilang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Lembang Burasia untuk tahun anggaran 2020 – 2022 sudah efektif dengan nilai rata – rata sebesar 90%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Lembang telah mampu melaksanakan tugasnya dalam hal merealisasikan pendapatan asli desa.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Lembang Burasia tahun anggaran 2020 – 2022 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien dengan rata – rata rasio sebesar 104%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Lembang Burasia untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan mengeluarkan biaya atau belanja Lembang yang cukup besar.

Sairain

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan penulis, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Lembang Burasia diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pendapatan asli desanya dengan cara memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli Lembang serta

menggali dan mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki lembang guna menambah sumber pendapatan asli lembang sehingga pendapatan asli Lembang Burasia dapat meningkat.

2. Pemerintah Lembang Burasia diharapkan dapat lebih menekan pengeluaran atau belanja lembangnya terutama untuk belanja operasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan demikian, pemerintah Lembang Burasia dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima dengan pengeluaran yang tidak terlalu besar.

DAFTAR REFERENSI

- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317–332. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Darmasto, B., & Restu Agusti, dan. (n.d.). ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE BALANCED SCORECARD (Studi pada PT XL Axiata Tbk ± Jakarta) (Vol. 9, Issue 1).
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 11–27. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/267>
- Riau, U. K., & Indonesia, B. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. In *Trias Politika* (Vol. 1, Issue 2).
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, XII(11), 118–126.